



OPTIMASI STRATEGI KAMPANYE MILITER NON-KINETIK DALAM PENYIAPAN LOGISTIK DAERAH PANGKAL PERLAWANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEMALANG)

Samujiyo¹, Agus Winarna², Ahmad G. Dohamid³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

* Samujiyo@gmail.com

Korespondensi penulis: Samujiyo@gmail.com

Abstract. Logistics resilience is a vital element of the national defense system. In the context of increasingly multidimensional threats, defense readiness is not only measured by weaponry strength but also by the nation's ability to mobilize its strategic resources, particularly food, during peacetime. This study analyzes the collaboration among the Indonesian National Armed Forces (TNI), the government, Village Unit Cooperatives (KUD), and farming communities in strengthening the logistics readiness of Regional Base of Resistance (Daerah Pangkal Perlawanan/DPP) and formulates an adaptive and sustainable non-kinetic military campaign strategy. The research employed a qualitative method with a case study approach in Pemalang Regency, Central Java. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies involving key informants from TNI Headquarters, Army Headquarters, the Ministry of Agriculture, Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0711/Pemalang, KUD Gerak Bodeh, and local farmer groups. Data analysis applied thematic, content, and narrative approaches, validated through source triangulation, member checking, and audit trails. The results reveal that intersectoral collaboration between TNI and farmers has been functional but remains suboptimal due to coordination gaps, overlapping programs, and limited logistical management at the operational level. The roles of Babinsa and the Territorial Development Battalion (Yon TP) are crucial in territorial empowerment, farmer organization, and food production management, particularly rice and maize, to support defense logistics reserves. The main finding shows that food-based non-kinetic military campaigns can evolve into a strategic instrument to enhance regional resilience and readiness for Regional Resistance Operations (Opswanwil). The conceptual model produced, the Defence-Agriculture Collaboration Model (DACM), demonstrates that synergy among TNI, the government, KUD, and farmers embodies the doctrines of the Total People's Defense and Security System (Sishankamrata) and the Nusantara Defense Strategy (SPN). The study concludes that optimizing non-kinetic military campaign strategies requires systemic integration between territorial development and agricultural advancement through intersectoral collaboration, enabling DPP to function as a resilient, productive, and sustainable foundation for total people's defense.

Keywords: Non-Kinetic Military Campaign, Defense Logistics, Regional Base of Resistance, TNI-Farmer Collaboration, National Food Security.

Abstrak. Ketahanan logistik merupakan elemen vital dalam sistem pertahanan negara. Dalam konteks ancaman modern yang semakin multidimensi, kesiapan pertahanan tidak hanya diukur dari kekuatan persenjataan, tetapi juga dari kemampuan bangsa memobilisasi sumber daya nasional, terutama pangan strategis, sejak masa damai. Penelitian ini menganalisis kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah, Koperasi Unit Desa (KUD), dan masyarakat petani dalam memperkuat kesiapan logistik Daerah Pangkal Perlawanan (DPP), serta merumuskan strategi kampanye militer non-kinetik yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap informan dari Mabes TNI, Mabesad, Kementerian Pertanian, Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0711/Pemalang, KUD Gerak Bodeh, dan kelompok petani. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, konten, dan naratif serta divalidasi melalui



triangulasi sumber, member check, dan audit trail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara TNI dan petani telah berjalan fungsional, namun belum optimal akibat hambatan koordinasi, tumpang tindih program, dan keterbatasan manajemen logistik di tingkat tapak. Peran Babinsa dan Yon Teritorial Pembangunan (Yon TP) sangat strategis dalam pembinaan teritorial berbasis pangan, pengorganisasian kelompok tani, serta pengelolaan produksi beras dan jagung untuk mendukung cadangan logistik pertahanan. Temuan utama menunjukkan bahwa kampanye militer non-kinetik berbasis pangan bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah dan kesiapan Operasi Perlawanan Wilayah (Opswanwil). Model konseptual yang dihasilkan, Defence–Agriculture Collaboration Model (DACM), menegaskan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah, KUD, dan petani merupakan implementasi nyata dari doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN). Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi strategi kampanye militer non-kinetik memerlukan integrasi sistemik antara pembinaan teritorial dan pembangunan pertanian melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga DPP berfungsi sebagai basis pertahanan rakyat semesta yang tangguh, produktif, dan berdaya tahan tinggi.

Kata kunci: Kampanye Militer Non-Kinetik, Logistik Pertahanan, Daerah Pangkal Perlawanan, Kolaborasi TNI–Petani, Ketahanan Pangan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Kampanye militer non-kinetik menempati posisi strategis dalam arsitektur pertahanan modern karena kemenangan negara tidak lagi ditentukan semata oleh superioritas kekuatan tempur, tetapi oleh kemampuan bangsa menata ketahanan wilayah, menata sumber daya nasional, dan membangun resiliensi masyarakat sejak masa damai. Dalam konteks Indonesia, pangan merupakan salah satu unsur logistik paling kritis karena menentukan keberlangsungan Operasi Militer Perang (OMP), khususnya pada tahap Operasi Perlawanan Wilayah (Opswanwil). Tahap ini bersifat dominan **non-kinetik**, di mana kemampuan mempertahankan suplai logistik rakyat, terutama pangan, menjadi pusat gravitasi perlawanan. Dengan demikian, fokus penelitian pada kampanye non-kinetik memiliki dasar yang kuat, baik secara doktrinal maupun empiris, terutama untuk penyiapan Daerah Pangkal Perlawanan (DPP).

Secara normatif, konsep pertahanan Indonesia berpijak pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yakni sistem pertahanan yang menyeluruh, terpadu, dan melibatkan seluruh rakyat serta segenap sumber daya nasional. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **3 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 yang menetapkan tugas pokok TNI meliputi OMP dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan. Dengan demikian, pertahanan bukan hanya tanggung jawab TNI semata, tetapi juga kewajiban kolektif seluruh warga negara. Implementasi doktrin ini tercermin dalam SPN, yang menempatkan setiap jengkal wilayah tanah air sebagai pangkalan pertahanan melalui pembangunan postur TNI berbasis geografi, demografi, dan potensi sumber daya lokal (Kementerian Pertahanan RI, 2024). Konsep tersebut menjadi semakin relevan ketika ancaman non-militer, seperti krisis pangan dan energi, terbukti dapat melemahkan daya tahan bangsa secara lebih sistemik dibandingkan ancaman bersenjata. Secara konseptual–normatif, bangunan doktrin dan kebijakan ini menggambarkan *das Sollen*, yakni bagaimana seharusnya sistem pertahanan dan tata kelola pangan nasional dirancang secara terintegrasi untuk menopang kesiapan logistik pertahanan di seluruh wilayah.



Dalam tataran operasional, Operasi Militer Perang (OMP) dilaksanakan ketika Indonesia menghadapi ancaman agresi militer eksternal. OMP mencakup babak penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Dalam babak penindakan terdapat empat tahap penting, yakni penindakan awal, penindakan utama, Operasi Perlawanan Wilayah (Opswanwil), dan serangan balas. Tahap Opswanwil memiliki arti strategis karena dijalankan ketika kekuatan konvensional belum mampu melumpuhkan musuh secara penuh. Pada fase ini, taktik gerilya, sabotase, dan mobilisasi rakyat menjadi instrumen utama. Nasution (1953) menegaskan bahwa perang gerilya pada hakikatnya adalah perang rakyat, di mana kekuatan utamanya terletak pada keterlibatan rakyat, penguasaan medan, serta semangat juang, bukan semata pada persenjataan. Pandangan klasik tersebut kemudian mendapat penguatan dari teori modern logistik pertahanan yang menempatkan pasokan pangan dan jalur distribusi sebagai urat nadi perlawanan. Oleh karena itu, keberhasilan Opswanwil tidak hanya ditentukan oleh daya tempur, tetapi oleh kemampuan mempertahankan pasokan logistik di tingkat wilayah. Dalam konteks inilah peran Kodim, Koramil, dan Babinsa menjadi faktor utama dalam menjamin keberlangsungan logistik pangan yang menopang perlawanan rakyat semesta.

Dalam kerangka operasional tersebut, doktrin Dukungan Logistik TNI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1007/XI/2016 menetapkan bahwa kebutuhan logistik dibagi ke dalam lima kelas bekal, yakni Bekal Kelas I (makanan), Kelas II (kaporlap dan perlengkapan satuan), Kelas III (bahan bakar), Kelas IV (material konstruksi dan alsus), dan Kelas V (amunisi). Penelitian ini memfokuskan pada Bekal Kelas I karena merupakan jenis logistik yang tidak hanya dikonsumsi secara berkelanjutan oleh pasukan, tetapi juga harus diproduksi secara terus-menerus oleh masyarakat di wilayah. Dengan demikian, logistik pangan menjadi elemen paling kritis dalam menopang kesiapan DPP sebagai basis pertahanan wilayah.

Selain itu, doktrin TNI juga menetapkan standar kemampuan dukungan berlapis, yakni kemampuan mempertahankan dukungan logistik selama 3 hari di daerah tempur, 7 hari di daerah komunikasi, dan 30 hari di daerah belakang. Pola dukungan 3–7–30 hari ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada mobilitas pasukan, tetapi sangat ditentukan oleh keberadaan cadangan logistik wilayah yang aman, terdistribusi, dan terlindungi. Dengan demikian, pembentukan cadangan pangan daerah, termasuk melalui pembangunan gudang dan bunker bawah tanah yang terintegrasi dengan sistem rotasi stok, menjadi kebutuhan strategis bagi kesiapan DPP dalam mendukung operasi perlawanan wilayah.

Berbeda dengan kerangka *das Sollen* yang ideal tersebut, *das Sein* atau kondisi empirik sistem logistik pangan nasional Indonesia hingga kini masih menghadapi sejumlah kerentanan mendasar. Cadangan pangan nasional masih tersentralisasi di gudang Perum Bulog. Dalam masa damai, mekanisme ini memang efektif untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat, tetapi dalam skenario perang, gudang Perum Bulog justru menjadi target strategis yang rawan diserang. Kehancuran satu simpul logistik nasional dapat mengakibatkan gangguan rantai pasok dan kelangkaan pangan serentak di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan cadangan logistik pangan khusus militer yang ditempatkan di lokasi-lokasi aman, seperti bunker bawah tanah, dengan sistem pengamanan dan rotasi stok yang terintegrasi dengan Perum Bulog. Mekanisme ini tidak hanya memastikan keamanan logistik militer, tetapi juga menjamin stabilitas pasokan sipil dalam kondisi krisis. Prinsip *dual-use logistics* yang

diterapkan secara disiplin dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kesiapan pertahanan. Dengan pendekatan ini, setiap daerah tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga pangkalan logistik yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu dalam mendukung pertahanan semesta.

Dalam konteks kewilayahan, Kabupaten Pematang Jaya memiliki karakteristik geografi yang meliputi kawasan daratan dan pesisir. Zona daratan didominasi oleh lahan persawahan padi dan jagung, serta komoditas hortikultura di wilayah perbukitan; sementara sektor peternakan rakyat dan perikanan pesisir menyediakan sumber protein hewani yang penting bagi ketahanan pangan wilayah. Dengan demikian, ketahanan pangan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya merujuk pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup hortikultura, peternakan, dan perikanan sebagai satu kesatuan kapasitas pangan daerah yang relevan untuk dikembangkan sebagai cadangan logistik DPP.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang sistematis dan berkelanjutan. Pada tataran daerah, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya menjadi wadah integrasi antara kepentingan pembangunan sipil dan kebutuhan pertahanan. Dalam forum ini, Kodim sebagai unsur kewilayahan TNI dapat berperan aktif bersama Pemda dalam menentukan lokasi Daerah Pangkal Perlawanan (DPP), menyinergikan program pertanian dengan kebutuhan logistik pertahanan, serta memastikan keberlanjutan pasokan pangan strategis. Dalam mekanisme ini, akademisi memegang peran penting sebagai penelaah kebijakan dan penyedia dasar ilmiah melalui riset terapan, analisis daya dukung wilayah, serta evaluasi efektivitas program ketahanan pangan berbasis pertahanan. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkuat basis ilmiah perencanaan daerah, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik terhadap kebutuhan pertahanan nasional. Sinergi antara pemerintah, militer, dan akademisi dalam kerangka *Collaborative Governance* mencerminkan semangat Sishankamrata dalam konteks modern, yaitu pertahanan semesta berbasis partisipasi dan keilmuan.

Research gap penelitian ini terletak pada kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Pada tataran *das Sollen*, doktrin Sishankamrata, Strategi Pertahanan Nusantara (SPN), serta kebijakan ketahanan pangan nasional menuntut adanya sistem logistik pangan yang terdesentralisasi, adaptif, dan terintegrasi dengan penyiapan Daerah Pangkal Perlawanan (DPP) dalam kerangka kampanye militer non-kinetik. Sistem ini idealnya dibangun melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, KUD/BUMDes, dan masyarakat petani. Namun, *das Sein* menunjukkan kondisi empirik yang berbeda. Penyiapan logistik DPP berbasis pangan strategis hingga kini belum dirancang secara sistemik: cadangan pangan nasional masih tersentralisasi pada gudang Perum Bulog; forum Musrenbang daerah belum secara konsisten mengintegrasikan kebutuhan pertahanan ke dalam perencanaan pertanian; dan penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya membahas peran TNI dalam ketahanan pangan atau OMSP secara parsial, tanpa mengembangkan model optimasi strategi kampanye militer non-kinetik untuk penyiapan logistik DPP di tingkat kabupaten.

2. TINJAUAN PUSTAKA



Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan doktrin pertahanan nasional Indonesia yang dipilih sebagai Grand Theory penelitian ini. Pemilihan teori ini didasarkan pada kedudukannya yang paling otoritatif dan komprehensif dalam sistem pertahanan negara, karena menegaskan bahwa pertahanan bukan hanya tanggung jawab TNI, melainkan kewajiban seluruh warga negara. Dengan fondasi ini, penelitian memperoleh legitimasi normatif dan ideologis untuk menjelaskan keterlibatan rakyat, termasuk petani, dalam penyiapan logistik strategis bagi kepentingan pertahanan. Sishankamrata berfungsi sebagai fondasi filosofis, ideologis, dan normatif yang membingkai argumen mengapa keterlibatan rakyat, khususnya petani, dalam menyiapkan logistik pertahanan wilayah merupakan kebutuhan strategis. Melalui teori ini, kolaborasi multipihak yang dipimpin oleh TNI dapat dipahami bukan sekadar program pembangunan pangan, melainkan implementasi konkret dari sistem pertahanan rakyat semesta.

Teori Collaborative Governance dipilih karena secara langsung menjelaskan mekanisme tata kelola multipihak yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam konteks pertahanan pangan, tidak ada satu aktor pun yang mampu menyiapkan logistik strategis secara mandiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, militer, masyarakat, dan lembaga ekonomi rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Winarna (2023), “collaborative governance merupakan model tata kelola publik yang menempatkan aktor non-pemerintah sejajar dengan pemerintah dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dengan prinsip partisipasi setara, akuntabilitas bersama, dan kepemimpinan fasilitatif” (hlm. 17). Definisi ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya berbicara tentang koordinasi antarinstansi, tetapi juga tentang pembagian peran dan tanggung jawab bersama dalam mencapai hasil yang berdampak luas terhadap masyarakat. Fokus penelitian adalah optimasi strategi kampanye militer non-kinetik dalam penyiapan logistik DPP, dan teori Collaborative Governance menyediakan kerangka kelembagaan yang menjelaskan bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui perangkat teritorialnya, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pemerintah daerah, Koperasi Unit Desa (KUD), serta kelembagaan petani di tingkat taktis dapat disinergikan dalam mekanisme tata kelola kolaboratif yang terintegrasi.

Teori Territorial Defense Management dipilih karena penelitian ini berfokus pada penyiapan logistik DPP yang tidak dapat dilepaskan dari peran struktur komando teritorial TNI dalam sistem pertahanan berbasis wilayah. Model pertahanan semacam ini menuntut adanya integrasi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), pemerintah daerah, dan kelembagaan sipil lokal dalam satu sistem manajemen pertahanan yang terencana dan berkoordinasi. Menurut Priyanto (2023), “territorial defense management integrates military territorial command with civilian governance structures in a planned and coordinated system to ensure unity of defense effort and resource efficiency” (hlm. 42). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan pertahanan wilayah hanya dapat dicapai melalui sinergi yang terorganisasi antara otoritas militer dan sipil dalam satu tata kelola pertahanan yang terpadu. Teori ini menekankan bahwa struktur komando teritorial — mulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) — harus terhubung secara sistematis dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Koperasi Unit Desa (KUD), dan kelembagaan petani sebagai simpul



logistik. Sinergi ini diwujudkan melalui perencanaan terintegrasi, pelaksanaan bersama, dan evaluasi berlapis, sehingga pertahanan wilayah dapat berjalan efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ancaman. Dalam kerangka tersebut, setiap desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan berlapis yang terhubung dalam jaringan DPP.

Teori Strategi Logistik Militer dipilih karena logistik merupakan faktor vital dalam keberhasilan maupun kegagalan operasi militer. Dalam konteks penelitian ini, penyiapan logistik pangan di DPP tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip logistik militer yang telah dikembangkan sejak era klasik hingga modern. Alasan pemilihan teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana logistik, khususnya pangan, berperan sebagai pusat gravitasi dalam strategi kampanye militer non-kinetik. Pemikiran Antoine Henri Jomini, yang menegaskan bahwa garis operasi dan jalur suplai merupakan elemen paling penting dalam strategi perang. Menurut Jomini (1838/2006) “The fundamental principle of war is to operate with the utmost rapidity and to direct the mass of forces upon decisive points” (p.247) menegaskan bahwa penguasaan atas jalur logistik menentukan kemampuan pasukan untuk bertahan maupun menyerang. Pemikiran ini diperkuat oleh Martin van Creveld (1977) yang menyatakan bahwa “logistics is the lifeblood of operational success” (p. 1). Pandangan ini menegaskan bahwa tanpa logistik yang terjamin, tidak ada operasi militer yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Teori Ketahanan Pangan Nasional dipilih karena langsung berkaitan dengan peran TNI dalam mendukung penyediaan pangan strategis, yang menjadi inti dari penelitian ini. Alasan pemilihan teori ini adalah karena ia dikembangkan oleh akademisi Universitas Pertahanan Indonesia, sehingga kontekstual dengan kebutuhan pertahanan nasional dan relevan secara institusional dengan penelitian. Sudibyo (2020) menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, dan TNI memiliki mandat konstitusional untuk mendukung penyediaannya melalui operasi militer selain perang. Dalam perspektif pertahanan, ketahanan pangan dipahami sebagai cadangan logistik strategis yang harus dikelola secara terencana untuk mendukung operasi militer maupun menghadapi ancaman non-militer. Sudibyo (2017; 2020) menunjukkan bahwa peran TNI dalam mendampingi petani, mengawal distribusi pupuk, serta membantu penyimpanan cadangan pangan merupakan implementasi langsung dari OMSP dan sejalan dengan doktrin pertahanan rakyat semesta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji fenomena strategis kampanye militer non-kinetik dalam penyiapan logistik Daerah Pangkal Perlawanan (DPP). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan interaksi antara TNI, pemerintah, KUD, dan masyarakat petani dalam konteks pertahanan non-kinetik. Dengan demikian, pemilihan metode kualitatif bukan hanya karena sifat fenomena yang kontekstual, tetapi juga karena selaras dengan paradigma ilmiah yang menekankan pemaknaan subjektif terhadap tindakan sosial dan strategi pertahanan (Creswell, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Fokus kajian, yaitu optimalisasi kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Daerah, KUD, dan masyarakat petani dalam penyediaan, pengelolaan, dan distribusi logistik DPP.



Pemilihan Kabupaten Pemalang sebagai lokasi studi kasus tidak semata berdasarkan ketersediaan data, tetapi juga atas pertimbangan keterwakilan konseptual (conceptual representativeness). Pemilihan waktu penelitian disesuaikan dengan siklus tanam–panen komoditas beras dan jagung di Kabupaten Pemalang, sehingga temuan lapangan mencerminkan kondisi aktual kesiapan logistik wilayah untuk mendukung DPP. Subjek penelitian ini terdiri dari pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kampanye militer non-kinetik berbasis pangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik integratif yang mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, kategorisasi, dan tematisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

Peran Strategis TNI dalam Bidang Pertanian

Sistem pertahanan di Kabupaten Pemalang berada di bawah kendali Kodim 0711/Pemalang, yang merupakan bagian dari Kodam IV/Diponegoro. Kodim berfungsi menyelenggarakan pembinaan teritorial (Binter) untuk menyiapkan potensi wilayah pertahanan, membina perlawanan rakyat, dan melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Dalam konteks ini, Kodim 0711/Pemalang menjadi aktor kunci koordinatif antara struktur pertahanan dan pemerintahan sipil. Kodim menjembatani sinergi antara Dinas Pertanian, Kementerian Koperasi, KUD Segarbo Bodeh, dan pemerintah daerah melalui forum Muspida dan Tim Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten. Pada tingkat taktis, Babinsa berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan OMSP, bertugas memotivasi, mendampingi, dan membina petani agar kegiatan pertanian berjalan produktif sekaligus menopang sistem logistik pertahanan wilayah.

Dalam kerangka penguatan fungsi OMSP, TNI AD sedang mengembangkan satuan baru berupa Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang berorientasi pada pemberdayaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan kesejahteraan. Walaupun secara operasional Yon TP belum berperan aktif di seluruh wilayah Indonesia, satuan ini dirancang untuk menjadi instrumen strategis pendukung DPP, terutama di sektor logistik dan ketahanan pangan. Yon TP memiliki potensi besar sebagai pelaksana pembangunan fisik pertahanan wilayah, seperti pembukaan lahan, pembangunan fasilitas irigasi, serta penguatan sistem produksi dan distribusi pangan strategis. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, Yon TP ditempatkan sebagai konsep inovatif dan strategis yang dapat dikembangkan menjadi tulang punggung operasional DPP di masa depan.

Dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi rakyat, Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Tahun 2024–2025 telah meluncurkan program pembentukan Koperasi



Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. TNI mendapatkan mandat sebagai motor penggerak utama koperasi rakyat berbasis pertahanan tersebut, dengan tugas memastikan setiap kabupaten memiliki sistem koperasi yang menyatukan dimensi ekonomi dan pertahanan. Di Kabupaten Pemalang, program Koperasi Merah Putih tidak hanya berfokus pada empat kecamatan selatan (Belik, Moga, Watukumpul, dan Pulosari) yang merupakan kawasan potensial DPP, tetapi meliputi seluruh wilayah kabupaten. Program ini dirancang sebagai lembaga agro-teritorial kabupaten, yang mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, dan cadangan logistik pangan secara menyeluruh. Struktur Koperasi Merah Putih di Pemalang diarahkan untuk menjadi wadah ekonomi rakyat yang memiliki fungsi ganda—sebagai penggerak kesejahteraan petani sekaligus penyangga ketahanan nasional di tingkat wilayah.

Koperasi ini berperan sebagai pusat integrasi antara Babinsa, petani, dan pemerintah daerah, sehingga menciptakan jejaring ekonomi yang selaras dengan sistem pertahanan semesta. Program ini menjadi sarana implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di sektor kesejahteraan, karena menghubungkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan kesiapan logistik wilayah pertahanan. Peran Koperasi Merah Putih di Pemalang juga diperkuat dengan dukungan Dinas Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pendampingan berbasis referensi akademik dan pelatihan dari berbagai lembaga pendidikan pertahanan dan pertanian nasional. Dalam konteks ini, kajian dan riset dari Universitas Pertahanan RI dan Universitas Brawijaya digunakan sebagai rujukan konseptual dan sumber praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian presisi dan manajemen kelembagaan ekonomi rakyat, tanpa keterlibatan langsung dalam penelitian ini.

Kolaborasi lintas aktor tersebut mencerminkan prinsip *Collaborative Governance* (Winarna, 2022) dan konsep Penta Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), di mana unsur pemerintah, TNI, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat bersinergi dalam satu ekosistem pertahanan pangan berkelanjutan. Sistem kelembagaan seperti ini menjadi fondasi penerapan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) yang menggabungkan kemandirian ekonomi rakyat dengan ketahanan wilayah. Dengan demikian, sistem kelembagaan di Kabupaten Pemalang telah menunjukkan arah transformasi menuju ekosistem pertahanan pangan terintegrasi, di mana peran TNI dan masyarakat petani saling melengkapi dalam membangun ketahanan nasional berbasis pangan dan wilayah.

Pola Kolaborasi Lintas Sektor

Koordinasi antar-lembaga di Kabupaten Pemalang dilaksanakan melalui mekanisme berlapis yang mencakup forum koordinasi daerah, rapat lintas sektor, dan komando kewilayahan. Pola ini menempatkan Kodim 0711/Pemalang sebagai pengendali dan penyatu program, dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta KUD Segarbo Bodeh sebagai mitra teknis yang berperan dalam pelaksanaan di lapangan. Koordinasi lintas lembaga ini berlangsung secara reguler melalui pertemuan bulanan di tingkat kabupaten, dan dilanjutkan dengan forum teknis di kecamatan yang melibatkan para Babinsa, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta ketua kelompok tani.

Proses koordinasi di tingkat daerah melibatkan peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang dalam menyediakan data lahan, sarana produksi pertanian (*saprodi*), serta validasi



produktivitas setiap musim tanam. Sementara itu, KUD Segarbo Bodeh dan KUD Merah Putih berperan sebagai pengelola distribusi saprodi dan penyerapan hasil panen, serta memastikan alur logistik pertanian berjalan tepat waktu dan sesuai target. Kodim 0711/Pemalang memastikan setiap tahapan kegiatan tersebut terintegrasi dengan sistem pembinaan teritorial dan mekanisme pengawasan Babinsa. Dengan pola seperti ini, rantai koordinasi logistik pertanian dapat berjalan secara simultan antara pemerintah daerah, TNI, dan lembaga ekonomi rakyat.

Menurut Kadistan Pemalang, pola koordinasi ini berhasil menciptakan sistem komunikasi yang efektif antaraktor, sehingga setiap keputusan strategis dapat segera diterjemahkan ke dalam tindakan lapangan (Kadistan Pemalang, wawancara, 23 Maret 2025). Ia menilai bahwa dukungan TNI, khususnya Babinsa, memperkuat kecepatan implementasi kebijakan karena mereka memiliki kedekatan sosial dengan petani dan pemahaman lapangan yang konkret. Dengan demikian, mekanisme koordinasi lintas lembaga di Kabupaten Pemalang bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaboratif antaraktor yang berbeda latar belakang dan fungsi.

Secara konseptual, mekanisme koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan prinsip *Collaborative Governance* (Winarna, 2022), yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat dicapai melalui interaksi berulang, kepercayaan antaraktor, dan orientasi tujuan bersama. Dalam konteks pertahanan, pola koordinasi yang dijalankan di Pemalang mencerminkan integrasi antara *state actors* dan *community actors* yang saling memperkuat dalam satu sistem logistik rakyat. Melalui mekanisme ini, setiap unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi bagian dari jejaring pertahanan non-kinetik yang bergerak serempak dari tingkat pusat hingga desa.

TNI, melalui peran Babinsa, menjadi penggerak utama di lapangan yang menjaga kedisiplinan, konsistensi pelaksanaan program, dan stabilitas sosial masyarakat petani. Pendampingan yang dilakukan Babinsa mencakup pengawasan masa tanam, penggunaan pupuk berimbang, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Sementara itu, Dinas Pertanian berperan sebagai penyedia input teknis dan sarana produksi, serta sebagai penjamin mutu terhadap proses produksi pertanian. Di sisi lain, KUD Segarbo Bodeh dan KUD Merah Putih bertanggung jawab terhadap pengelolaan hasil panen, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga tercipta kesinambungan antara fungsi produksi dan fungsi ekonomi masyarakat desa. Sinergi ini membentuk sistem kerja yang saling menguatkan antara fungsi militer sebagai stabilisator sosial dan fungsi ekonomi rakyat sebagai aktor produksi dan distribusi pangan strategis.

Dinamika kolaborasi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat petani di Kabupaten Pemalang memberikan dampak strategis yang signifikan terhadap ketahanan wilayah dan stabilitas sosial. Kolaborasi ini membentuk integrasi antara pembangunan ekonomi pertanian dengan pembinaan pertahanan teritorial, sehingga menghasilkan sistem ketahanan yang bersifat ganda: ketahanan pangan sekaligus ketahanan nasional.

- a. Meningkatnya kemandirian pangan daerah telah memperkuat basis logistik strategis bagi DPP. Kemandirian ini ditunjukkan oleh peningkatan produksi padi dan jagung, efisiensi distribusi saprodi melalui KUD, serta kemampuan daerah untuk menjaga stok pangan tanpa ketergantungan pada pasokan luar. Kondisi tersebut menjadikan Pemalang sebagai

- salah satu model daerah dengan ketahanan pangan terintegrasi dengan sistem pertahanan wilayah.
- b. Integrasi antara program OMSP TNI dan program pertanian daerah menciptakan pola kerja lintas instansi yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat programatik, tetapi juga membangun struktur sosial baru di tingkat desa yang lebih disiplin, produktif, dan resilien.
 - c. Kolaborasi lintas sektor ini menumbuhkan disiplin sosial dan etos kerja kolektif di tingkat akar rumput, yang menjadi fondasi penting bagi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Babinsa dan KUD berperan sebagai pendorong perubahan perilaku masyarakat petani menuju kemandirian dan ketahanan sosial. Penguatan moral, semangat gotong royong, serta pengendalian sosial berbasis komunitas menjadi elemen yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis pangan maupun krisis sosial-ekonomi.
 - d. Dalam perspektif jangka panjang, pola kerja sama lintas sektor ini memiliki potensi replikasi di wilayah lain, terutama di daerah-daerah rawan krisis pangan dan bencana alam. Model kolaborasi Pemalang menunjukkan bahwa pendekatan pertahanan non-kinetik berbasis pangan dapat diintegrasikan dengan strategi pembangunan daerah tanpa mengubah fungsi utama TNI. Hal ini membuka peluang untuk menjadikan kolaborasi TNI–masyarakat sebagai instrumen pertahanan modern yang partisipatif dan berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 kebijakan OMSP dalam pembangunan nasional.

Selain itu, dampak kolaborasi lintas sektor juga dapat ditinjau dari dimensi keamanan manusia (*human security*), di mana ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup rakyat. Peningkatan kapasitas produksi, stabilitas sosial, serta kemandirian ekonomi desa menciptakan lingkaran ketahanan wilayah yang memperkuat daya tangkal nasional terhadap ancaman non-militer.

Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang berlangsung di Pemalang tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi pertanian, tetapi juga transformasi sistemik dalam manajemen wilayah pertahanan. Hubungan antara Babinsa, pemerintah daerah, dan masyarakat telah menciptakan tatanan sosial baru yang selaras dengan prinsip Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap elemen bangsa berperan aktif dalam menjaga stabilitas, kemandirian, dan daya tahan nasional.

Sistem Logistik Pertahanan Berbasis Pangan

Analisis efektivitas strategi logistik wilayah diarahkan untuk menilai sejauh mana sistem logistik saat ini yang dibangun melalui kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Pemalang mampu memperkuat kesiapan DPP serta mendukung kampanye militer non-kinetik berbasis pangan. Efektivitas sistem ini diukur berdasarkan tingkat keterpaduan antarunsur, efisiensi dalam distribusi, keberlanjutan cadangan pangan, dan kontribusinya terhadap ketahanan wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Strategi Logistik Militer (Van



Creveld & Jomini) yang menegaskan bahwa keberhasilan pertahanan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekuatan tempur, tetapi juga pada kesiapan dan ketahanan sistem logistik yang menopang operasi pertahanan. Dalam konteks tersebut, TNI bukan hanya bertindak sebagai pengguna logistik, melainkan sebagai penggerak sistem logistik rakyat berbasis sumber daya lokal, yang merupakan implementasi nyata dari doktrin Sishankamrata tentang keterlibatan seluruh potensi nasional dalam pertahanan negara.

Efektivitas Sistem Logistik Wilayah. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sistem logistik wilayah yang dikembangkan di Kabupaten Pemalang telah membentuk rantai logistik yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal antara unsur produksi, distribusi, dan penyimpanan cadangan pangan. Kodim 0711/Pemalang berperan sebagai pengendali utama jaringan distribusi pangan strategis melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian, KUD Segarbo Bodeh, dan kelompok tani. Struktur koordinasi ini menjamin ketersediaan bahan pangan utama (beras dan jagung) tetap stabil, bahkan di masa paceklik atau kondisi darurat. Secara empiris, indikator efektivitas sistem logistik terlihat dari meningkatnya kapasitas penyimpanan gabah di gudang KUD sebesar 35 persen dan efisiensi waktu distribusi dari tingkat desa ke kabupaten yang berkurang dari rata-rata empat hari menjadi dua hari. Pola distribusi terpadu yang dijalankan oleh Kodim dan KUD berhasil menekan potensi kerawanan pasokan serta menjamin ketersediaan pangan strategis bagi wilayah DPP. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem logistik berbasis kolaborasi sipil–militer dapat berfungsi sebagai tulang punggung ketahanan logistik pertahanan wilayah.

Kesiapan Logistik Daerah Pangkal Perlawanan (DPP). Kesiapan logistik wilayah DPP yang meliputi empat kecamatan selatan, yaitu Belik, Moga, Watukumpul, dan Pulosari, mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan bahan pangan strategis secara mandiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa sinergi antara Kodim 0711 dan KUD Merah Putih telah meningkatkan kemampuan daerah dalam menjaga cadangan pangan secara berkelanjutan. Pembangunan gudang logistik terpadu di tingkat kecamatan serta sistem rotasi distribusi antar desa menciptakan keseimbangan stok pangan di seluruh wilayah DPP. Kesiapan ini diperkuat oleh keberadaan pusat-pusat cadangan pangan desa yang terhubung dengan gudang logistik Kodim dan Perum Bulog. Mekanisme pengawasan stok pangan dilakukan oleh Babinsa melalui sistem pelaporan periodik yang memastikan distribusi tetap terkontrol dan merata. Dengan pola tersebut, struktur logistik wilayah di Pemalang mampu berfungsi ganda: sipil untuk ketahanan ekonomi rakyat dan militer untuk kesiapan pertahanan wilayah. Hal ini sejalan dengan prinsip Strategi Pertahanan Nusantara, di mana setiap daerah diarahkan menjadi basis produksi sekaligus benteng ketahanan nasional.

Implikasi Strategis terhadap Ketahanan Nasional. Efektivitas strategi logistik wilayah di Pemalang memberikan dampak nyata terhadap penguatan ketahanan nasional, baik secara ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Pertama, keberhasilan kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan KUD memperkuat kemandirian pangan sebagai komponen vital sistem pertahanan non-kinetik. Ketersediaan pangan di tingkat desa memastikan masyarakat tidak bergantung pada pasokan luar, sehingga meningkatkan daya tahan ekonomi daerah terhadap krisis nasional maupun global. Kedua, kesiapan logistik wilayah menciptakan disiplin sosial dan solidaritas kolektif yang memperkuat daya tangkal sosial terhadap ancaman krisis dan disinformasi. Ketiga, strategi ini membangun karakter masyarakat yang tangguh, mandiri, dan berorientasi



bela negara. Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), keberhasilan Pemalang membangun sistem logistik terintegrasi menjadi bukti konkret efektivitas kolaborasi multi-aktor. Model ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan karakteristik sosial-ekonomi lokal. Dengan pola seperti ini, TNI tidak hanya memperkuat pertahanan fisik, tetapi juga memperluas makna pertahanan melalui pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Strategi logistik wilayah terbukti menjadi instrumen efektif dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

5) KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

TNI, khususnya Babinsa, memiliki peran sangat penting dalam menggerakkan, memotivasi, dan mendisiplinkan petani. Babinsa tidak hanya hadir sebagai pembina teritorial, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan kegiatan pertanian berjalan efektif dan efisien. Mereka membantu mengatur jadwal tanam serentak, memantau distribusi pupuk bersubsidi, memfasilitasi penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), serta mengawasi stabilitas harga gabah di tingkat petani. Pendekatan yang digunakan Babinsa berorientasi pada keteladanan dan kedekatan sosial, sehingga masyarakat merasa dilibatkan, bukan diperintah. Kehadiran Babinsa di setiap desa binaan menciptakan suasana kerja yang produktif. Para petani mengaku lebih percaya diri dan bersemangat karena merasa mendapat dukungan langsung dari aparat negara. Beberapa informan bahkan menyebut Babinsa sebagai “penjaga sawah rakyat”, karena selalu memonitor perkembangan tanaman dan membantu mengatasi kendala di lapangan.

Kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Pemalang berjalan dinamis dan terstruktur. Kolaborasi ini melibatkan unsur TNI, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, KUD Merah Putih, dan kelompok tani. Setiap lembaga memiliki peran fungsional yang saling melengkapi: TNI bertanggung jawab pada aspek pembinaan dan koordinasi lapangan; Kementerian Pertanian menyediakan dukungan teknis dan bibit unggul; Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi regulasi dan anggaran; sementara KUD menjadi penggerak ekonomi rakyat yang mengelola hasil produksi serta penyaluran sarana produksi pertanian. Dari data wawancara terungkap bahwa mekanisme koordinasi dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat Kodim hingga desa.

Kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Pemalang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan wilayah. Berdasarkan laporan KUD Merah Putih, produksi gabah meningkat dari 820 ton pada tahun 2023 menjadi 1.250 ton pada tahun 2024, sementara produksi jagung mengalami kenaikan sekitar 35 persen. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi juga oleh penerapan sistem tanam serentak yang lebih disiplin, serta koordinasi distribusi input pertanian yang semakin efektif. Selain capaian kuantitatif, terdapat pula dampak sosial-psikologis yang signifikan, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan sebagai bagian dari bela negara dan pertahanan semesta.

Bagi TNI, kolaborasi ini memperkuat kehadiran mereka di tengah masyarakat serta memperluas implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di sektor pertanian. Bagi



masyarakat, keterlibatan TNI menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pemerintah, meningkatkan disiplin kerja kelompok tani, dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa. Sedangkan bagi negara, keberhasilan ini menandai lahirnya model pertahanan non-kinetik berbasis pangan, di mana kemandirian pangan rakyat menjadi salah satu sumber kekuatan strategis pertahanan nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara TNI dan masyarakat petani tidak hanya menghasilkan peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga membangun daya tangkal strategis (strategic resilience) bangsa melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan logistik pangan daerah.

Sehingga, Kabupaten Pemalang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai prototipe Defence Food Base atau Daerah Pangkal Perlawanan (DPP) berbasis pangan strategis. Melalui integrasi lintas sektor—Kodim 0711/Pemalang, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas PU, Bappeda, KUD Merah Putih, serta kelompok petani binaan—terbentuk model kolaboratif yang merepresentasikan prinsip Collaborative Governance. Model ini membuktikan bahwa mekanisme pertahanan non-kinetik dapat berjalan melalui penguatan sistem produksi dan distribusi pangan rakyat. Dengan dukungan Yon TP sebagai construction and production force, kegiatan pembangunan irigasi, jalan produksi, dan gudang bawah tanah dapat menjadi elemen penting kesiapsiagaan logistik daerah. Sinergi ini memperlihatkan bahwa kesiapan pertahanan tidak hanya bersumber pada alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga pada alat utama sistem logistik (aluslog) yang tumbuh dari rakyat.

b. Saran.

Pada tataran nasional, pemerintah perlu menempatkan ketahanan pangan sebagai komponen utama pertahanan negara, sejajar dengan aspek militer dan ekonomi. Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Markas Besar TNI diharapkan menyusun kebijakan induk integrasi pertahanan–pangan nasional melalui pembentukan National Defence Agriculture Policy Framework (NDAPF) yang memayungi kerja sama lintas kementerian. Kebijakan ini harus melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membangun satu sistem terpadu antara produksi pangan, logistik wilayah, dan kesiapsiagaan nasional.

Kemhan dan Mabes TNI disarankan mengembangkan dokumen resmi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bidang Ketahanan Pangan Nasional, yang di dalamnya memuat peran TNI AD dalam pembinaan teritorial produktif serta tata kelola Defence Food Base/DPP di tiap kabupaten. Selain itu, perlu dibentuk Pusat Pengembangan Pertahanan Non-Kinetik dan Ketahanan Pangan Nasional di bawah koordinasi Kemhan, yang berfungsi sebagai pusat kajian, pelatihan, dan monitoring pengembangan model DACM. Langkah ini akan memastikan konsistensi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah serta memberikan kerangka hukum dan administratif bagi penguatan pertahanan berbasis pangan.

Pada tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten), perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor antara Kodam, Korem, Kodim, dan pemerintah daerah. Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Perum Bulog Cabang di setiap wilayah harus terlibat aktif dalam pembentukan dan pengelolaan DPP sebagai defence food



base. Setiap Kodam disarankan menetapkan minimal satu DPP per Kodim sebagai kawasan pilot project pengembangan sistem logistik pertahanan pangan daerah, yang dikelola bersama antara Kodim, Yon TP, dan perangkat daerah. Skema ini dapat difasilitasi melalui kerja sama antarinstansi dengan dukungan anggaran program lintas kementerian (Kemhan–Kementan–Kemenkop–KemenPUPR).

DAFTAR PUSTAKA

- Afpriyanto, A., Putra, I. N., Jupriyanto, & Sari, P. (2024). Critical role of maritime infrastructure in Indonesian defense logistics management towards the world maritime axis. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v10i1.1085>
- Arifin, A. S. (2021). Territorial defence management dalam perspektif ketahanan wilayah. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 101–120. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v7i2.732>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Clausewitz, C. von. (1989). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Halkis, M. (2020). *Metodologi penelitian pertahanan: Pendekatan filosofis, strategis, dan sosial*. Universitas Pertahanan Press.
- Herlambang, S., & Mulyaningtyas, A. (2021). *Pertanian berkelanjutan di era revolusi industri 4.0*. UB Press.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Jomini, A. H. (2006). *The art of war*. J. B. Lippincott. (Original work published 1838)
- Kartika, J. L., Sarjito, A., & Purwantoro, S. A. (2025). Evaluating the effectiveness of Indonesia's military logistics through the 3C's of logistics approach. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.31098/fjmr.v4i2.1584>
- Kaunang, E. S., Hadiano, M., & Purwanto, S. (2024). THE STRATEGIC, MILITARY AND COUNTERINSURGENCYTACTICS OF THE PERMESTA MOVEMENT (CASE STUDY GUERRILLA WARFARE IN SULAWESI). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4059-4076.



-
- Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage Publications.
- Kurniawan, A., & Setiawan, D. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan: Konsep dan implementasi di Indonesia. UI Press.
- Marimin, & Anisa, N. (2022). Teknologi manajemen rantai pasok pertanian (supply chain management). UB Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Nasution, A. H. (1953). Pokok-pokok gerilya. Dinas Penerangan Angkatan Darat.
- Prasetyo, A., & Hidayat, S. (2019). Koperasi dan pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat. UB Press.
- Prasetiawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). THE STRATEGY TO IMPROVE THE CHARACTER OF MILITARY ACADEMY CADETS THROUGH THE ROLE OF MENTORS IN SHAPING PROFESSIONAL OFFICERS TO SUPPORT THE MAIN DUTIES OF THE INDONESIAN ARMY: *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(6), 2184-2191.
- Pananggungan, B. D., & Purwanto, S. (2025). Pemanfaatan Pilot Drone Sipil Sebagai Bagian Komponen Cadangan Pertahanan Negara. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 346-354.
- Purnomo, E., & Hadi, S. (2018). Dinamika pertanian dan ketahanan pangan nasional. UB Press.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Soetopo, W., & Suroso, D. (2020). Manajemen kelembagaan pertanian dan penguatan gapoktan. UB Press.
- Sulaiman, A. A. (2024). Manajemen sumber daya pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Universitas Pertahanan Press.
- Sudibyo, H. (2020). Peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional: Perspektif OMSP. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 77–95.
<https://doi.org/10.33172/jpbn.v6i1.714>
- Sulaiman, A. A. (2024). Manajemen sumber daya pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 1–15.
<https://doi.org/10.22146/jkn.v30i1.84523>
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).



-
- Tentara Nasional Indonesia. (2024). Buku Putih Pertahanan Negara 2024. Kementerian Pertahanan RI.
- Tentara Nasional Indonesia. (2025). Doktrin Tridek TNI (Edisi Revisi 2025). Mabes TNI.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (2024). Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ketahanan Pangan. Mabesad.
- Tentara Nasional Indonesia. (2025). Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Produksi Ketahanan Pangan. Mabes TNI.
- Van Creveld, M. (1977). *Supplying war: Logistics from Wallenstein to Patton*. Cambridge University Press.
- Winarna, A. (2023). *Collaborative governance: Teori & praktik dalam perspektif kebijakan pertahanan*. CV Aksara Global Akademia.
<https://www.scribd.com/document/661789712/Collaborative-Governance-Dr-Agus-Winarna>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Zulkifli. (2022). Peran komando kewilayahan dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan: Studi kasus Kampung Moibaken dan Kampung Suneri, Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 210–228.
<https://doi.org/10.22146/jkn.v28i2.76021>